

## **Kependudukan dan Pembangunan Pendidikan**

**Oleh: Ace Suryadi\*)**

**Abstrak:** *Pembangunan pendidikan perlu memperhatikan keanekaragaman budaya, sosial, etnik dan struktur serta populasi pendudukan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk yang jika dibina dan dikembangkan melalui sistem pendidikan yang tepat akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Sayangnya, sistem pembangunan pendidikan Indonesia selama ini lebih berorientasi dan pandangan ke dalam (inward looking) dalam rangka pencapaian target pembelajaran dan pengembangan peserta didik dan kurang memberikan orientasi dan pandangan ke luar (outward-looking) dalam rangka pengembangan dan investasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang hasilnya baru dapat dilihat beberapa tahun mendatang (jangka panjang). Sebagai investasi, pembangunan pendidikan sudah selayaknya mendapatkan porsi anggaran yang signifikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM penduduk Indonesia sesuai dengan potensi alam sekitar agar dapat menghasilkan produk dan jasa layanan yang sangat kompetitif pasar global. Dengan demikian, jumlah pendudukan yang besar dan tersebar ini dapat dipetakan dan kemudian dikembangkan melalui strategi dan kebijakan pendidikan yang memperhatikan aspek-aspek penting di luar pendidikan, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia sehingga peringkat HDI Indonesia dapat terus meningkat ke arah yang lebih baik.*

**Kata Kunci:** *Pembangunan Pendidikan, Kebijakan dan Strategi Pendidikan, Penduduk Indonesia, Human Development Index.*

---

<sup>\*)</sup> Ace Suryadi adalah Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

## 1. Pendahuluan

Pembangunan pendidikan kini tidak bisa lagi dikembangkan dalam perspektif ke dalam (*inward looking*), yaitu dalam rangka mendidik manusia agar cerdas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan berkepribadian mulia. Pendidikan mesti berorientasi keluar (*outward looking*), yakni untuk menumbuhkembangkan sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang baik di masyarakat. Sehingga, proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber penggerak (*driving forces*) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan mesti berhubungan secara timbal balik dengan pembangunan di berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya). Sehingga, pendidikan akan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk investasi SDM untuk menciptakan iklim yang memungkinkan semua penduduk atau warga negara turut andil dalam pem-

angunan dan mengembangkan diri mereka agar menjadi warga negara yang produktif.

Pembangunan di Indonesia perlu mempertimbangan program atau agenda internasional yang ditujukan kepada setiap negara, misalnya Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs); dan memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Agenda dan target pembangunan internasional tersebut mestinya menjadi target utama pembangunan di Indonesia, dengan menempatkan pendidikan sebagai strategi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Permasalahan pendidikan terkait dengan sumber daya manusia Indonesia dapat dilihat dari turun naiknya peringkat HDI Indonesia. Sejak tahun 1995, peringkat HDI Indonesia menurun: peringkat ke-104 pada tahun 1995, ke-109 pada tahun 2000, ke-110 pada 2002, ke-112 pada tahun 2003, dan kemudian - sedikit membaik - ke-111 pada tahun 2004 dan ke-110 pada tahun 2005. Memasuki 2006, posisi Indonesia mulai menaik hingga berada di posisi 108, dan pada tahun 2007 menjadi urutan ke-107. Kenaikan tersebut dipicu oleh peningkatan angka

keniraksaraan penduduk Indonesia yang merupakan salah satu indikator kunci penilaian HDI. Oleh karena itu, upaya pemberantasan buta aksara yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara sangat efektif untuk meningkatkan peringkat HDI. Selain itu, reformasi pendidikan seharusnya mengacu pada pembangunan sosial dan ekonomi dan berbasis kebutuhan tenaga kerja di tingkat lokal dan nasional.

## 2. Kajian Literatur

### 2.1 Penduduk Indonesia

Pada 2007, jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 juta jiwa yang terdiri atas 300 lebih kelompok etnis. Mereka mempunyai sekitar 583 bahasa daerah dan dialeknya, dan menganut agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia terbagi dalam 33 provinsi yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal ekonomi, geografi, agama, budaya, suku, dan bahasa. Indonesia tergabung dalam kelompok *E-9 Countries*, yaitu negara-negara yang sistem pendidikan mereka melayani penduduk besar di wilayah yang sangat luas. Oleh sebab itu, reformasi pendidikan

yang telah berjalan harus berpijak pada potensi, peluang, dan hambatan sesuai dengan kondisi geografis, ekonomis, kultural, dan faktor-faktor terkait lainnya.

Letak geografis, luas wilayah, dan penyebaran penduduk Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan sistem politik dan administrasi publik di Indonesia. Saat ini terdapat 33 provinsi dan lebih dari 440 kabupaten/kota di Indonesia. Setiap pemerintahan daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sendiri. Kepadatan penduduk di Indonesia sangat bervariasi: dari 1.000 orang per km<sup>2</sup> di Pulau Jawa hingga 8 orang per km<sup>2</sup> di Papua. Tingkat kepadatan penduduk Indonesia rata-rata mencapai sekitar 120 orang per km<sup>2</sup>. Penyebaran penduduk yang tidak merata tersebut berpengaruh secara signifikan pada pelayanan dan pembiayaan pendidikan.

Rencana pengembangan dan pelaksanaan reformasi pendidikan semestinya mengindahkan kondisi geografis dan penyebaran penduduk yang unik ini. Sebagai contoh, 60% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, yang luas areanya hanya 7% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebaliknya, Sulawesi, Maluku dan Papua memiliki penduduk 21% dari seluruh penduduk Indonesia, padahal ketiga daerah ini sebesar 69% dari luas wilayah Nusantara. Konsekuensinya, isu utama dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah efektivitas dan efisiensi biaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Lebih dari itu, reformasi pendidikan seharusnya juga peka terhadap keragaman penganut agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran-aliran kepercayaan).

Pada tahun 2005, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 17,4%. Jumlah penduduk miskin di pedesaan (67% atau 25 juta jiwa atau 20,3% dari penduduk desa) lebih banyak ketimbang di perkotaan (33% atau 12 juta jiwa atau 13,55% dari penduduk kota). Kebanyakan penduduk miskin ini bekerja di sektor pertanian, dan 68% pekerja di pedesaan bekerja di sektor nonformal. Maka, faktor pokok penentu pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan masyarakat desa untuk mengikuti pendidikan dan bekerja di sektor formal tidak lain adalah perbaikan akses pendidikan dasar di jalur pendidikan formal dan non-formal bagi masyarakat desa.

Namun, ada kecenderungan yang menarik. Diperkirakan di masa mendatang persentase jumlah penduduk di luar Pulau Jawa akan meningkat. Sebab, pertumbuhan-penduduk alami di pulau-pulau di luar Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di Pulau Jawa. Selain itu, perpindahan penduduk ke pulau-pulau tersebut pun merupakan faktor yang patut diperhatikan. Yang juga penting untuk dicatat adalah struktur umur penduduk yang masih tergolong muda dan relatif berkualitas rendah, sehingga program peningkatan pendidikan dan kesehatan di masa depan masih sangat dibutuhkan.

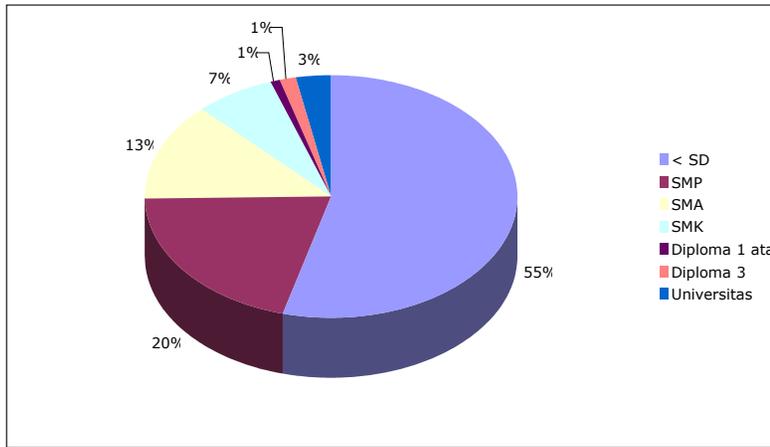
Jumlah dan komposisi penduduk saat ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan hidup, faktor demografi dan faktor-faktor kesehatan di masa yang lalu. Demikian pula, jumlah dan komposisi penduduk di masa yang akan datang sangat dipengaruhi faktor-faktor kesehatan saat ini dan di masa yang akan datang. Usia perkawinan pertama seorang wanita dan tingkat pemakaian alat KB, misalnya, sangat memengaruhi jumlah anak yang akan dilahirkan. Faktor-faktor kesehatan lainnya juga berdampak pada tingkat kelahiran dan kematian penduduk.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur derajat kesehatan suatu negara adalah angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR), yaitu angka peluang seorang bayi untuk meninggal sebelum mencapai umur tepat satu tahun. Indikator ini berkaitan sangat erat dengan perubahan dari norma kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern. Angka IMR Indonesia pada 2000 mencapai 47 per seribu kelahiran (turun dari 71 pada dekade 1980-an). Meski demikian, angka ini masih yang tertinggi di negara-negara ASEAN.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, angka fertilitas total atau *Total Fertility Rate* (TFR) Indonesia - yaitu angka yang menunjukkan rata-rata anak yang akan dilahirkan seorang wanita, seandainya dia hidup sampai masa reproduksinya berakhir—mengalami penurunan. Pada 1990-an, TFR kita mencapai 2,344 (turun dari 3,326 pada dekade 1980-an). TFR di luar Pulau Jawa masih tetap lebih tinggi daripada di Pulau Jawa, walaupun perbedaan tersebut makin kecil pada 1990-an. Perbedaan TFR antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa ini diakibatkan oleh program KB yang telah lebih dahulu dilaksanakan di Pulau Jawa dan baru kemudian diterapkan di luar Pulau Jawa.

Indonesia menduduki ranking ke tiga dari bawah dalam hal indeks persaingan ekonomi global. Dua puluh lima persen (25%) perusahaan Indonesia mempekerjakan tenaga kerja yang rendah kualifikasinya. Sejak 1997, kebanyakan lapangan kerja berada di sektor informal dan usaha kecil dan menengah. Namun, pembangunan ekonomi Indonesia memberi kontribusi yang kian meningkat pada sektor-sektor sekunder dan tersier di empat bidang yaitu: industri pengolahan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan keuangan. Sebaliknya, kontribusinya justru menurun pada sektor primer, misalnya sektor pertanian. Mutu lulusan pendidikan pada sektor-sektor sekunder dan tersier menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Alhasil, reformasi pendidikan harus memperhitungkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, terutama mereka (pekerja rumah tangga dan pekerja anak) yang berada di bawah garis kemiskinan yang jumlahnya kurang lebih 85%.

Sementara itu, diperkirakan sekitar 2,3 juta lulusan sekolah memasuki pasar kerja setiap tahunnya hingga lima tahun ke depan. Data angkatan kerja Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4, Angkatan Kerja, 2005

Dari angka tersebut, jumlah pengangguran pada usia 15-24 tahun—khususnya wanita—lebih banyak di pedesaan. Oleh karena itu, perencanaan Pendidikan Untuk Semua dan perluasan pendidikan sangat memperhitungkan faktor demografi, sosial-budaya dan kesehatan.

Penurunan angka pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini diakibatkan oleh semakin menurunnya tingkat kematian dan kelahiran. Namun, penurunan angka kelahiran lebih cepat dibandingkan dengan penurunan angka kematian. Ditinjau dari struktur umur, penduduk Indonesia masih tergolong “muda”, dan jumlah penduduk usia muda di

masa mendatang cenderung menurun, tetapi angka harapan hidupnya condong meningkat. Pada 2004 ini, angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah 66 tahun, dengan *dependency ratio* sebesar 0,51. Pada 2003, *dependency ratio* dunia adalah 0,59, dan *dependency ratio* Asia 0,56. Di waktu yang sama, *dependency ratio* Jepang 0,49, China 0,41, Malaysia 0,61, Singapura 0,39, dan Amerika Serikat 0,52.

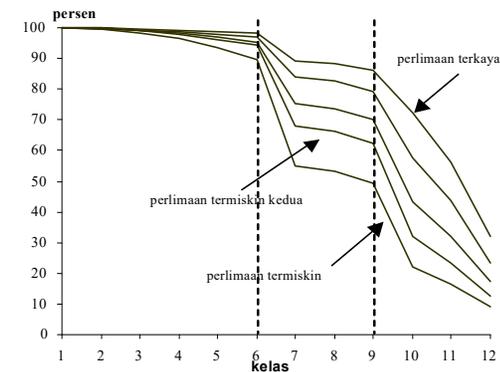
## 2.2 Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Pendidikan

Kebijakan pembangunan pendidikan juga harus memperhatikan keseimbangan antara situasi dan kondisi penduduk dan kependudukan,

pembangunan di bidang ekonomi dan bidang sosial. Angka kemiskinan masih cukup tinggi meskipun perbaikan ekonomi terus dilakukan setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi sejak 1997. Pembangunan ekonomi menemui kesulitan yang berkepanjangan, sehingga pendapatan perkapita penduduk (GDP) menurun drastis dari 5-6% per tahun jadi 3-4 % per tahun dalam satu dasawarsa ini. Syahdan, sebetulnya pembangunan pendidikan memainkan peran kunci dalam menanggulangi kemiskinan melalui perluasan akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar dan program lanjutannya guna menghasilkan lulusan yang dapat menjadi pekerja mandiri dan produktif dengan upah yang makin tinggi. Terkait dengan itu,

pembangunan pendidikan sepatutnya dilakukan dalam rangka menciptakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan motivasi tenaga kerja yang menjamin pertumbuhan dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional maupun global. Dan, target utamanya adalah mempercepat peningkatan kualitas SDM dan menaikkan posisi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dunia.

Perbedaan partisipasi pendidikan antara kelompok pengeluaran keluarga pada semua jenjang pendidikan terlihat dengan jelas. Pada jenjang pendidikan SD/MI, kesenjangan pendidikan antara kelompok perlimaan termiskin dan terkaya dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) relatif kecil. Pada kelas awal SD/MI



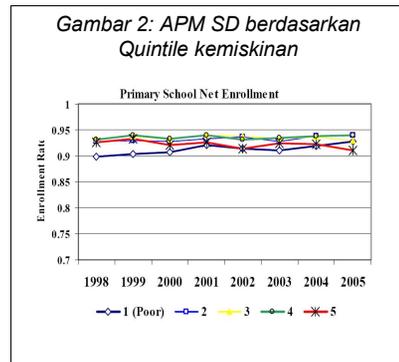
Gambar 1: APK Berdasarkan Kemampuan Ekonomi Keluarga

(kelas 1-3), perbedaan tersebut tidak ada, tetapi pada kelas akhir, perbedaan partisipasi pendidikan makin kentara, meskipun tidak terlalu besar. Apabila kita amati jenjang SMP/MTs dan SMA/MA, perbedaan partisipasi pendidikan terlihat makin melebar. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1, 2 dan 3.

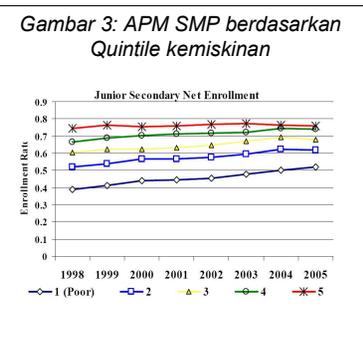
Dalam persepektif gender, pada APS, APK, dan APM tahun 2005 dapat dikemukakan bahwa secara nasional relatif tidak ada kesenjangan gender yang signifikan pada tingkat SD/MI. Kesenjangan gender dalam pendidikan justru terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa sampai 2004, kesenjangan antara lelaki dan perempuan dalam memperoleh akses pendidikan pada tingkat SD/MI bisa

dikatakan sudah tidak ada lagi. Kondisi ini bisa tercapai karena adanya Program Wajib Belajar SD, sehingga ketersediaan dan pemerataan fasilitas pendidikan relatif tersebar merata di seluruh pelosok tanah air.

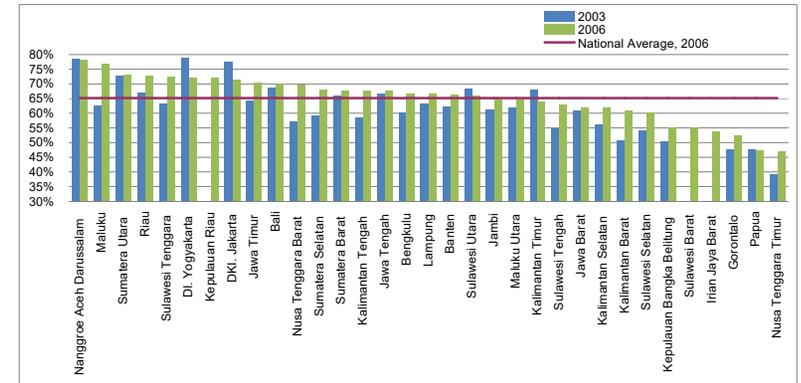
Pada jenjang SMP/MTs, secara nasional kesenjangan gender terjadi pada lelaki, yaitu sekitar 2-3%. Program wajib belajar berdampak pada peningkatan partisipasi perempuan terutama di pedesaan. Sedikitnya jumlah murid lelaki di pedesaan ini sebetulnya dikarenakan faktor pragmatis, yaitu ekonomi keluarga di pedesaan: anak laki-laki diharuskan segera bekerja untuk membantu memperoleh pendapatan keluarga, sementara anak perempuan tidak mempunyai tanggung jawab semacam itu.



**Gambar 2: APM SD berdasarkan Quintile kemiskinan**



**Gambar 3: APM SMP berdasarkan Quintile kemiskinan**



**Gambar 5: Perbedaan APK, berdasarkan Provinsi**

Secara nasional, khususnya di wilayah pedesaan tidak terjadi kesenjangan gender yang signifikan pada jenjang pendidikan SM/MA. Kesenjangan gender terhadap perempuan justru terjadi di wilayah perkotaan yaitu sekitar 2-3%. Hal ini terjadi karena pengaruh nilai-nilai sosial-budaya yang tumbuh dan berkembang serta diyakini oleh kebanyakan masyarakat. Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa lelaki adalah penopang ekonomi dan oleh karena itu lebih penting untuk diberikan kesempatan pendidikan yang setinggi-tingginya dibandingkan dengan perempuan yang dianggap lebih berperan di lingkungan keluarga. Sehingga, apabila keluarga dihadapkan pada suatu keadaan, mereka lebih memilih

untuk menyekolahkan anak lelaki daripada anak perempuan.

Pada jenjang pendidikan tinggi (PT), terjadi kesenjangan gender antara lelaki dan perempuan walaupun angkanya tidak terlalu besar yaitu sekitar 1-2%. Hal ini juga terjadi pada daerah pedesaan, tempat kesenjangan gender pada tingkat ini relatif kecil. Justru, kesenjangan gender terhadap perempuan terjadi di daerah perkotaan yaitu sekitar 2%. Seperti halnya dalam gejala kesenjangan gender pada tingkat SM/MA di daerah perkotaan, gejala kesenjangan gender di tingkat PT juga dipengaruhi faktor sosial-budaya; dan masyarakat beranggapan bahwa laki-laki lebih diutamakan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi diban-

dingkan dengan perempuan. Faktor nilai sosial-budaya tersebut juga berkaitan dengan faktor ekonomi, yakni keterbatasan biaya dan kesempatan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan.

Di samping kesenjangan pendidikan dalam kaitan dengan gender di atas, sebenarnya kesenjangan pendidikan pada jenjang SLTP hingga PT terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yaitu sekitar 15-20% (Susenas, BPS, 2004). Perbedaan akses terhadap pendidikan tersebut disebabkan antara lain oleh faktor biaya, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, masyarakat daerah pedesaan juga menghadapi masalah jarak tempuh rumah-sekolah akibat dari penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang tidak merata. Di samping itu, pemahaman orangtua untuk mendorong anak-anak mereka bersekolah juga masih minim, terutama di daerah. Kesenjangan akses terhadap pendidikan juga dapat dilihat menurut wilayah provinsi sebagai mana terlihat pada gambar 5.

Pembangunan sistem pendidikan nasional melibatkan seluruh komponen pendidikan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan secara terpadu dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

berkualitas, terampil, cerdas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya yang menyeluruh dan sungguh-sungguh dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan pendidikan mencakup berbagai dimensi yang luas dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.

Akan tetapi, selama ini pembangunan pendidikan nasional dirasa belum mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional memandang bahwa perencanaan untuk mewujudkan cita-cita yang luhur tersebut sangat penting. Depdiknas kemudian menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra ini menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan,

mulai dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan, untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan nasional serta mengevaluasi hasilnya.

Pada 2005, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tentang RPJMN Tahun 2004-2009 yang mengamanatkan tiga misi pembangunan nasional, yaitu (1) Mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai; (2) Mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) Mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk mewujudkannya, bangsa kita harus memiliki SDM yang berkualitas, sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global.

Saat ini, pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai dengan yang dicita-citakan. Depdiknas selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja, melainkan juga aspek-aspek watak, moral, sosial dan fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, Depdiknas menetapkan beberapa strategi dan program dasar pembangunan pendidikan yang disusun berdasar skala prioritas. Strategi dan program ini mendasari seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Strategi dan program yang dimaksud adalah (i) Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (ii) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan (iii) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

### 2.3 Pendidikan Dan Investasi SDM

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi SDM (*Human Capital Development*) yang mampu menciptakan iklim yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk turut ambil bagian dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pembangunan pendidikan harus mengembangkan dan menyebarluaskan nilai dan sikap produktif SDM. Hal ini dapat dilakukan melalui dua kemampuan sekaligus. *Pertama*, kemampuan teknis berupa peningkatan kecakapan, profesi, dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan lapangan kerja yang

terus berubah. *Kedua*, kemampuan yang mengembangkan nilai budaya positif dan kondusif yang dapat mendorong manusia Indonesia menjadi kekuatan penggerak pembangunan; kemampuan kedua ini berupa wawasan, penalaran, etos kerja, kemampuan belajar secara terus-menerus.

Selama ini, pendidikan hanya dipandang sebagai suatu sektor pembangunan yang semata-mata dianggap sektor pembelanja anggaran negara (*budget spender*). Akibatnya, sektor pendidikan selalu mendapatkan anggaran yang relatif kecil karena dianggap tidak mampu secara langsung menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Sesungguhnya, pendidikan juga dapat dikategorikan sebagai sektor produktif: investasi pendidikan akan menghasilkan balikan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya investasi di sektor fisik. Memang, rentang waktu (*lead time*) sektor pendidikan jauh lebih panjang namun dengan metode dan alat ukur analisis investasi pendidikan dapat diukur secara langsung dampak dan balikan investasi pendidikan.

Investasi sumber daya manusia melalui pendidikan dapat dibedakan dengan berlandaskan pada tiga konsep dalam ekonomi publik yaitu:

### 2.3.1 Pendidikan sebagai barang dan jasa umum (*public goods*)

Investasi pendidikan merupakan pembangunan infrastruktur publik (*public investment*) yang tidak berbeda dengan investasi pada infrastruktur umum lain seperti jalan, air bersih, drainase, dll. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan umum yang memadai dalam rangka memacu upaya mencerdaskan kecerdasan bangsa yang diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelaku utama dalam investasi pendidikan sebagai *public goods* adalah pemerintah. Sedangkan masyarakat hanya sebagai pembantu atau pendukung. Pendidikan sebagai *compulsory* (kewajiban) diaplikasikan dalam bentuk pelayanan pendidikan untuk semua, khususnya dalam penyelenggaraan program wajib belajar.

### 2.3.2 Pendidikan sebagai barang dan jasa produktif (*productive goods*)

Investasi pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas lulusan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah SDM setelah lulus dan bekerja. Nilai SDM sangat ditentukan oleh bertambahnya penguasaan keterampilan, keahlian, dan profesi untuk melakukan kerja produktif yang menguntungkan baik

bagi perseorangan, masyarakat, maupun Negara. Komponen pendidikan *productive investment* ini diselenggarakan melalui pendidikan persiapan kerja: pendidikan kejuruan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, kursus-kursus, pelatihan kerja industri, dan sejenisnya. Selain pemerintah, investasi pendidikan ini dilakukan juga oleh swasta, masyarakat, dan perorangan.

### 2.3.3 Pendidikan sebagai barang atau jasa kapital (*capital goods*)

Investasi pendidikan ditujukan dalam rangka membentuk SDM unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi sumber penggerak bagi produktivitas berbagai sektor. *Knowledge Based Economic* dalam penerapannya dalam konteks pengembangan industri dan persaingan global saat ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan IPTEK dalam dunia pendidikan. Penerapan temuan IPTEK saat sangat menentukan tingkat kemenangan persaingan ekonomi dalam tingkat global. Apalagi, dengan adanya *Intellectual Property Right* di mana karya dan temuan intelektual dilindungi oleh hukum sehingga tidak bisa seseorang atau lembaga meniru atau menjiplak sebuah karya intelektual. Dengan

demikian investasi ini akan sangat mendukung dan menguntungkan masa depan industri suatu Negara apalagi dalam konteks persaingan dan pasar global.

Dengan demikian, dalam konteks pembangunan dan investasi pendidikan dapat dibangun dalam tiga fungsi dasar pendidikan yang seimbang yaitu: (1) mencerdaskan pendidikan kehidupan bangsa, dalam rangka pendidikan *compulsory education*; (2) mempersiapkan tenaga kerja yang cakap, terampil, dan terlatih untuk dapat bekerja dalam berbagai sector ekonomi, dalam rangka persiapan kerja (*labor/worker preparation*); dan (3) membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pendidikan keilmuan (*Sciences and Technology Development*). Tiga fungsi dasar pembangunan pendidikan dan investasi SDM tersebut dikaitkan dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan setiap warga Negara atau penduduk sesuai dengan potensi personal maupun potensi komunal (masyarakat atau Negara). Pemetaan potensi penduduk untuk dididik dan dilatih sesuai dengan potensi personal dan komunal agar dapat teraktualisasikan

sehingga menjadi sebuah keunggulan komparatif dan kompetitif.

## 2.4 Kebijakan Pembangunan Pendidikan Masa Depan

Pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dimulai dengan mengupayakan biaya pendidikan yang layak dan berani melakukan “pengorbanan” dari dahaga “konsumtivismen” sesaat, baik secara personal, komunal, maupun dalam kerangka kehidupan berbangsa. Bahwa investasi pada sector pendidikan akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Untuk itu, pembangunan pendidikan perlu dibangun dalam beberapa perspektif yaitu:

### 2.4.1 Pendidikan moral bangsa dalam era industri

Penguatan nilai dan moralitas bangsa perlu dilakukan agar tidak mudarnya nilai-nilai nasionalisme bangsa dalam era industri dan persaingan global. Manusia Indonesia yang berkualitas perlu memiliki integritas dan komitmen kebangsaan selain kemampuan dasar dalam penguasaan keahlian dari setiap cabang IPTEK, kemampuan bekerja profesional, dan kemampuan menghasilkan karya inovatif dan bermutu.

### 2.4.2 Pendidikan dan pengentasan kemiskinan

Pendidikan dapat dianggap sebagai faktor mendasar yang menentukan terhadap perolehan kesempatan kerja, status dan kedudukan, serta peran dan posisi social lain dalam kehidupan seseorang. Dengan demikian, pemerataan dan keadilan tingkat kesejahteraan social masyarakat akan dapat diwujudkan dengan pemberian dan pelayanan pendidikan bermutu untuk semua. Pemerataan pendidikan ini harus terwujud dalam konteks demokratisasi pendidikan. Setiap warga negara harus memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan minat bakat personal dan potensi komunal serta lingkungan alam sekitar baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

### 2.4.3 Pendidikan menuju standar internasional

Pengembangan standar sesuai dengan criteria internasional perlu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Hal ini juga berdampak pada adanya pengakuan dunia internasional terhadap lulusan lembaga pendidikan nasional. Sehingga, lulusan pendidikan dalam negeri dapat diakui dan dihargai sama di negara manapun di dunia.

### 2.4.4 Pendidikan dan peningkatan penguasaan IPTEK

Salah satu peran pendidikan adalah membantu lulusan lembaga pendidikan agar dapat memberikan arah dalam pengambilan keputusan dalam berkarir di dunia industri. Perkembangan dunia industri memunculkan sejumlah jabatan dan pekerjaan yang terus berkembang dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan IPTEK. Maka, pendidikan perlu mengenalkan dan mengembangkan berbagai temuan IPTEK.

### 2.4.5 Pendidikan kejuruan profesional dalam rangka peragaman jenis dan jabatan dan pekerjaan

Pendidikan kejuruan dan pendidikan kecakapan hidup (PKH) masih diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan yang menyiapkan lulusan yang menguasai keahlian dan kecakapan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pendidikan kejuruan dan pendidikan kecakapan hidup dikembangkan dengan memperhatikan 3 (tiga) spektrum atau orientasi yaitu: (1) Spektrum pedesaan, (2) Spektrum perkotaan, dan (3) Spektrum para-profesi yang berorientasi global.

### 2.4.6 Pendidikan dan produktivitas tenaga kerja

Pertumbuhan industri dan penda-yagunaan tenaga kerja terdidik harus terus bersinergi sebagai suatu siklus yang sehat agar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas serta daya saing bangsa. Pada tingkat pendidikan tinggi diharapkan mampu memberikan suplai yang baik agar kehidupan ekonomi dapat ditunjang dengan SDM yang professional. Pendidikan tinggi harus mampu menyeimbangkan dua peran utama pendidikan dalam bentuk pendidikan profesional dan pendidikan akademis. Pendidikan professional dapat diselenggarakan secara masal, sedangkan pendidikan akademis diperuntukan bagi kelompok masyarakat terbatas.

### 2.4.7 Partisipasi tenaga kerja perempuan

Peran kaum perempuan dalam konteks pendidikan dan pembangunan semakin menemukan nilai strategisnya. Sektor publik perlu terus membuka diri pada kaum perempuan yang memiliki potensi yang sama bahkan lebih dibandingkan laki-laki. Dunia pendidikan perlu mendorong peran dan potensi kaum perempuan agar dapat turut serta secara optimal dalam membangun kehidupan yang lebih sejajar dan lebih baik.

### 3. Simpulan dan Saran

#### 3.1 Simpulan

Proses pendidikan semestinya tidak hanya dilihat dari indikator efisiensi internal yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan *input*, proses, dan hasil belajar, tetapi juga harus dilihat dari indikator efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal ini akan membawa orientasi pendidikan pada wilayah makro: bahwa pendidikan bertalian dengan situasi dan kondisi demografi, geografi, dan ekonomi. Karenanya, pendidikan mesti membuahkan keuntungan ekonomis dan keuntungan sosial (*social rate of return*). Dengan demikian, pendidikan akan dimaknai dan dihargai sebagai sebuah investasi yang sangat menguntungkan di masa yang akan datang.

#### 3.2 Saran

Pengembangan strategi dan kebijakan pendidikan di Indonesia diharapkan tidak hanya berkuat pada

masalah internal pendidikan dalam konteks input, proses, dan hasil pendidikan tetapi memperhatikan terhadap dampak dan pengaruh pendidikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kepada para penentu kebijakan pendidikan di tingkat pusat maupun daerah perlu menggali dan memetakan potensi SDM dan sumber daya alam akan dapat disinergikan agar dapat bersaing dengan daerah dan/atau negara lain.

Masyarakat secara umum maupun dunia usaha dan industri perlu menyadari bahwa pendidikan memberikan saham kepada proses kegiatan industri dan kegiatan sehari-hari masyarakat baik di sengaja atau tidak. Maka, semua pihak harus dapat berpartisipasi dalam proses pendidikan sebagai investasi bersama secara bersama-sama untuk mendapatkan SDM yang berkualitas yang dapat membangun Indonesia di masa yang akan datang.

#### Pustaka Acuan

- Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara.  
 Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009, Jakarta: Depdiknas.  
 Suryadi, Ace. 2002. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

- ..... 1992. *Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengangguran Terdidik*. Jakarta: ISEI-LDUI  
 ..... 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.  
 .....1999. *Perkembangan Pendidikan di Indonesia setelah Satu Tahun Masa Krisis*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.  
 Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah. 2004. *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung: Genesindo  
 United Nation Development Program (UNDP). *Human Development Report*, tahun 2000 sampai dengan 2007.